

**PENGARUH SOSIALISASI PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI
KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI
KOTA CIREBON**

Dini Widiyana¹, Mukarto Siswoyo², Farida Nurfalih³

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

Research by the author is the Effect of Socialization Compulsory Nine- Year Basic Education Against Public Participation in the Field of Education in Sub Argasunya Harjamukti District of Cirebon. The problem that the writer suggested was the participation of society, especially in the field of education in Sub Argasunya Harjamukti District of Cirebon not maximized, the problem allegedly caused by non-optimal implementation of the socialization program of compulsory nine-year education by Cirebon City Department of Education. The research method that I use is a survey method, with quantitative descriptive analysis techniques. The research question asked, is there any influence of socialization program compulsory nine-year education on community participation in village Argasunya Harjamukti District of Cirebon. In the research showed that the result of socialization conducted by the Department of Education of City of Cirebon is quite good, but not optimal, as seen from the success of socialization which reached 65.6% with a total score of 3938, and community participation in education is quite good but not optimal as it reached 64.2% with a total score of 3854. the implementation of the program socialization compulsory nine-year education has a fairly close correlation to the participation in the Village Argasunya Harjamukti District of Cirebon to the value r^{xx} count 0,645 and 0,000 is a significant value less than 0.05 ($0.000 < 0.05$). Because of the significant value less than 0.05 then there is a positive and significant influence between the socialization of education program on community participation in education. Thus H_0 (the null hypothesis) is rejected and H_a (Alternative Hypothesis) is received.

Keywords: Socialization, Compulsory, Public Participation.

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan

untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan

anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan (3) pendidikan untuk semua (*education for all*).

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar sembilan tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu pada tahun 2006-2009 bertujuan untuk meningkatkan APK SMP/MTs/ setara hingga mencapai minimal 95%. Pada tahun 2009 APK nasional telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar sembilan tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai tujuh tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar sembilan tahun paling lambat pada tahun 2015.

Program wajib belajar sembilan tahun ini sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong

dan menggerakkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa program wajib belajar sembilan tahun bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Bornby misalnya, mengartikan partisipasi: "Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat." (Mardikanto, dan Poerwoko Soebiato. 2015:81)

Salah satu upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah melalui sosialisasi yang diberikan oleh Dinas

Pendidikan Kota Cirebon dan pihak-pihak terkait (Lurah, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat) mengenai program tersebut. Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Argasunya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sudah terlaksana tetapi masih belum optimal. Hal ini, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sekolah Menengah Pertama baru mencapai 63%, presentase anak yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama mencapai 37%. Jumlah siswa dari lulusan sembilan Sekolah Dasar di Argasunya berjumlah 383 namun yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama hanya 205 siswa. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian program wajib belajar menjadi alasan utama tidak optimalnya program yang dicanangkan pemerintah tersebut, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan ketidaktahuan sebagian masyarakat mengenai program pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah menyebabkan masih banyaknya orang

tua yang enggan menyekolahkan anaknya dan lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada bersekolah.

Rendahnya partisipasi masyarakat diduga karena kurangnya sosialisasi tentang program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini terlihat dari adanya indicator-indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai pentingnya program ini untuk dijalankan dan manfaat apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya program tersebut.
2. Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun.

HIPOTESIS

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistic merupakan hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang didasarkan atas data yang diperoleh dari sampel.

Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Sugiyono (2008:7) mengemukakan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Mengingat populasi dalam penyebaran kuesioner penelitian ini adalah termasuk dalam populasi besar yaitu masyarakat Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebagai subjek penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menentukan sampel menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* dengan presisi sebesar 10%. Jumlah sampel sebagai responden terpilih sebanyak 100 orang, Kemudian sampel dari tiap Rukun Warga penulis menggunakan rumus *Proportionate Stratified Random Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

2. Studi Lapangan, diantaranya:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Angket

Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas instrument dilakukan dengan membagi angket kepada 100 orang responden kemudian hasilnya diuji dengan merumuskan “*Koefisien Korelasi Pearson Product Moment*”. Uji Realibilitas merupakan suatu uji kehandalan instrumen penelitian. Instrumen dapat diuji menggunakan teknik *Cronbach alpha*.

Analisis Data

Penelitian dalam kuantitatif teknik analisis data menggunakan statistik. Pada analisis kuantitatif hasil penelitian dianalisis dengan uji statistic *non parametric*, yang penulis gunakan ialah rumus *Koefisien Korelasi Pearson Product Moment (rxy)*. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, dengan menggunakan Program Komputer *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

Istilah sosialisasi tidak asing lagi di kalangan masyarakat, praktisi dan

akademisi. Sosialisasi pada umumnya dimaknai sebagai usaha memperkenalkan sesuatu, baik produk, jasa, kebijakan, program, pemikiran, ide atau konsep. Namun, secara konseptual, sosialisasi dipandang secara beragam oleh para pakar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi dimaknai sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Definisi ini mengandung pengertian bahwa sosialisasi adalah usaha memberikan sesuatu, dapat berupa informasi, yang sebelumnya hanya dimiliki atau diketahui oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau khalayak yang lebih luas.

Charlotte Buehtar dalam Murdiyatmoko (2007:99) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses ini dapat berjalan serasi dan dapat pula terjadi pertentangan. Akan tetapi, selama individu merasa memerlukan kelompoknya, ia bersedia untuk mengadakan beberapa kompromi terhadap tuntutan kelompok. Soerjono

Soekanto dalam Murdiyatmoko (2007:99) menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. Menurut Robert M.Z Lawang dalam Murdiyatmoko (2007:101) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Menurut Karel J. Veeger dalam Murdiyatmoko (2007:101), sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi, individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, tetapi juga individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan diri. Dirdjosisworo dalam Abdul Syani, (2012:57) bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup kebudayaan masyarakatnya.

2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup.
3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

B. Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, di mana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang

dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

Partisipasi menurut Adisasmita (2006:35) adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat. Sedangkan partisipasi menurut Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:81) Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud mem peroleh manfaat. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti menyadari kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Cohen dan Uphoff dalam Sumaryadi (2010:54) menegaskan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu akan meliputi:

- 1) Partisipasi dalam sumberdaya;
- 2) Partisipasi dalam administrasi dan koordinasi;
- 3) Partisipasi dalam program.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Sosialisasi pada umumnya dimaknai sebagai usaha memperkenalkan sesuatu, baik produk, jasa, kebijakan, program, pemikiran, ide atau konsep. Namun, secara konseptual, sosialisasi dipandang secara beragam oleh para pakar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi dimaknai sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Definisi ini mengandung pengertian bahwa sosialisasi adalah usaha memberikan sesuatu, dapat berupa informasi, yang sebelumnya hanya dimiliki atau diketahui oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau khalayak yang lebih luas.

Dirdjosisworo dalam Abdul Syani (2012:57) bahwa sosialisasi

mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup.
2. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Penelitian tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dilakukan dengan menyebarkan semua daftar pernyataan di dalam angket. Berdasarkan hasil angket skor jawaban responden terdapat total skor sebesar 3938, hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sosialisasi di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tergolong pada katagori Cukup baik 65,6%.

Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari suatu program, apabila partisipasi masyarakat berada pada tingkatan yang baik maka suatu program dapat dikatakan berhasil, namun apabila rendah atau menurun dikatakan program tersebut belum berhasil atau kurang sukses, karena suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat.

Sesuai dengan anggapan dasar yang telah dikemukakan maka jelas bahwa menganalisa variabel partisipasi masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dilakukan dengan cara menelaah indikator-indikator partisipasi masyarakat melalui penerapan indikator yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dalam Sumaryadi (2010:81) Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi Dalam Sumber Daya
- b. Partisipasi Dalam Administrasi dan Koordinasi
- c. Partisipasi Dalam Program

Indikator-indikator tersebut akan dijabarkan secara jelas dalam bentuk pernyataan angket sehingga dari jawaban tersebut akan diperoleh

gambaran tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Berdasarkan hasil angket skor jawaban responden terdapat total skor sebesar 3854, hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tergolong pada katagori Cukup baik 64,2%.

Hambatan-Hambatan yang Ditemui oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam Melaksanakan Sosialisasi

Sebagaimana penulis kemukakan hasil pembahasan di atas tentang kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun, mengakibatkan belum maksimalnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang pendidikan. Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi diakibatkan oleh adanya faktor-faktor penghambat antara lain:

- 1) Kondisi geografis, menyulitkan bagi pihak-pihak yang bertugas memberikan sosialisasi tentang program wajib belajar. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Argasunya dimana pesertanya terdiri dari unsur pemerintahan (Lurah, Kepala

Sekolah, Tokoh Masyarakat,) dan juga masyarakat. Para peserta banyak yang tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut karena jarak dari tempat tinggal mereka cukup jauh dengan Kantor Kelurahan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang akses transportasinya belum memadai, sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

- 2) Budaya masyarakat yang masih kental, dimana pendidikan belum dianggap sebagai hal yang penting. Oleh karena itu, saat ada pelaksanaan sosialisasi tentang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun banyak masyarakat yang tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan sehingga sosialisasi yang diberikan tidak efektif dan tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Faktor-faktor tersebut di atas cenderung menghambat optimalisasi pelaksanaan sosialisasi sehingga belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh sosialisasi

program wajib belajar sembilan tahun terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon belum optimal sebagaimana terlihat dari keberhasilan pelaksanaannya yang baru mencapai tingkatan cukup baik atau sebesar 65,6% dengan total skor sebesar 3938. Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kota sudah memenuhi aspek-aspek sosialisasi akan tetapi masih belum optimal.
2. Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon baru berada pada tingkatan cukup baik atau sebesar 64,2% dengan total skor sebesar 3854. Partisipasi masyarakat sudah cukup mengacu pada indikator partisipasi masyarakat, akan tetapi baru berada pada tingkatan cukup baik/belum optimal dan perlu untuk terus ditingkatkan.
3. Pelaksanaan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun memiliki pengaruh yang cukup erat terhadap partisipasi masyarakat di

Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan r_{yx} hitung 0,645 dan bila dibandingkan dengan r_{yx} tabel dengan persisi 5% sebesar 0,195. Karena r_{yx} hitung lebih besar dari r_{yx} tabel maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dengan demikian maka H_0 (Hipotesis Nol) dan H_a (Hipotesis Alternatif) diterima.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam melaksanakan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun adalah sebagai berikut:

a) Kondisi geografis, menyulitkan bagi pihak-pihak yang bertugas memberikan sosialisasi tentang program wajib belajar. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Argasunya dimana pesertanya terdiri dari unsur pemerinthan (Lurah, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat,) dan juga masyarakat. Para peserta banyak yang tidak hadir dalam acara

sosialisasi tersebut karena jarak dari tempat tinggal mereka cukup jauh dengan Kantor Kelurahan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang akses transportasinya belum memadai, sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

b) Budaya masyarakat yang masih kental, dimana pendidikan belum dianggap sebagai hal yang penting. Oleh karena itu, saat ada pelaksanaan sosialisasi tentang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun banyak masyarakat yang tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan sehingga sosialisasi yang diberikan tidak efektif dan tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Davis. Keith, dan Jhon W. Newstrom. 2007. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Agus Darma. Jakarta: Erlangga
- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ikhsan, Fuad. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Murdiyatomoko, Janu. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grasindo Media Pratama
- Pramesti, Getut. 2014. *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Santoso, Singgih. 2009. *Statistik Non-Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media
- Sondang, Siagian P. 009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tirtaraharja, Umar dan S.L La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004, Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang *Wajib Belajar*